

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal sebagai daerah tujuan wisata, memiliki beraneka ragam objek wisata. Salah satu objek wisata yang sedang dikembangkan pemerintah kabupaten Sleman adalah objek wisata desa yaitu objek wisata desa Blue Lagoon. Objek Wisata Blue Lagoon terletak di Desa Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Objek wisata Blue Lagoon merupakan kawasan wisata yang dapat dikatakan baru, tetapi memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Objek Wisata Blue Lagoon memiliki potensi alam dan menyuguhkan wisata alam berupa sumber air alam dari pegunungan Merapi yang dapat menarik minat para pengunjung.

Obyek wisata Blue Lagoon Yogyakarta merupakan objek wisata alam yang berupa sungai yang memiliki ari dari sumber mata air alami, dimana sekeliling sungai tumbuh pohon-pohon bambu yang rindang dan asri sehingga membuat air dalam sungai berwarna kebiruan. Obyek wisata Blue Lagoon mulai dikenal masyarakat pada tahun 2014, walaupun sebelum dikenal masyarakat luas sering dikunjungi penduduk setempat, hanya sekedar mandi. Pada penduduk setempat sering dikenal dengan nama Tirta Budi. Hal ini karena sungai tersebut pernah di menenggelamkan seseorang yang bernama "Budi", dikarenakan memiliki penyakit ayan. Namun kemudian tempat ini kembali dipopulerkan setelah kedatangan mahasiswa KKN dari Universitas Gadjah Mada.

Dampak keberadaan wisata blue lagoon selama ini mampu berpengaruh pada sosial ekonomi masyarakat. Namun dari segi sosial terdapat permasalahan yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berpendidikan. Hal ini karena potensi alam yang tersedia diperlukan pengembangan yang baik dari sumber daya manusia yang profesional. Hasil wawancara di lapangan menunjukkan dalam pengelolaan objek wisata Blue Lagoon masih adanya kepentingan individu dalam pengembangannya. Masih terjadinya masalah yang serius berupa Sumber Daya Manusia yang mengelola Wisata Blue Lagoon. Masyarakat sekitar belum sepenuhnya terlibat, sehingga banyak konflik seperti perebutan lahan parkir. Pedagang-pedagang yang belum di organisasi, sehingga banyak pedagang yang memberikan harga yang

berbeda pada barang yang sejenis. Permasalahan-permasalahan ini akibat masih rendahnya pendidikan penduduk sekitar.

Kabupaten Sleman saat ini serius dalam memperhatikan desa wisata. Desa wisata telah memberikan kontribusi PAD terhadap daerah, sehingga perlu dikembangkan. Desa wisata muncul karena adanya sebuah desa yang memiliki potensi atau kekayaan sumber alam yang layak dikembangkan. Potensi tersebut dikembangkan penduduk setempat yang sadar akan potensi alam desa yang dimiliki sehingga masyarakat desa tersebut sadar akan peningkatan kesejahteraan penduduk menjadi hal utama dalam tujuan pengembangan desa wisata. Desa wisata di wilayah Kabupaten Sleman merupakan potensi yang diharapkan mampu menjadi andalan pariwisata daerah. Sleman memiliki sekitar 30 desa wisata (Sleman Regency, 2007: 25)

Selama ini desa wisata hanya dikunjungi wisatawan dengan mengelilingi desa wisata tersebut, wisatawan hanya melihat kehidupan masyarakat desa tanpa menginap, ini disebut wisata desa (www.slemankab.com). Wisata desa saat ini menjadi harapan pengembangan perekonomian pedesaan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu perlu pengelolaan yang profesional dan perlu menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang mendukung perkembangan desa wisata. Pariwisata di Kabupaten Sleman telah menyumbang 23% dari total PAD Kabupaten Sleman (Tribun.Com). Sektor Pariwisata Kabupaten Sleman menyumbang rata-rata 800 Miliar tiap tahunnya. Angka ini merupakan peluang besar bagi kabupaten Sleman untuk mengelola wisata desanya dalam rangka meningkatkan sumbangan sektor wisata di Kabupaten Sleman.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sleman tahun 2019 telah mencanangkan tiga program dan kegiatan yaitu; (1) Program pengembangan pemasaran pariwisata (2) Program pengembangan destinasi pariwisata (3) Program pengembangan kemitraan. Ketiga program tersebut telah terealisasi, namun apabila hasil evaluasi berdasarkan capaian kinerja atas kunjungan wisata dari target pada tahun 2018 sebanyak 8 juta orang dapat terealisasi sebanyak 9,9 Juta orang. Hal ini melampaui target yang ditentukan. Sementara, kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB) sebesar 23%. Sehingga kunjungan wisatawan pada destinasi pariwisata di wilayah

Kabupaten Sleman memiliki potensi yang tinggi untuk terus ditingkatkan (Sleman dalam Angka tahun 2019). Hal ini perlunya peningkatan SDM atau pekerja wisata dalam mendukung pariwisata yang berada di kawasan destinasi pariwisata Kabupaten Sleman. Selain itu, para pekerja wisata belum memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang potensi wisata yang berada di wilayahnya dalam menopang penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya wisata desa yang sedang berkembang.

Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta jika dilihat dari potensi Pariwisata cukup berpeluang, namun pemanfaatan peluang tersebut belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya sumber daya alam yang strategis yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten untuk kesejahteraan rakyat dan pengembangan wisata, sehingga masih rendahnya sumber manusia yang mengelola potensi-potensi yang ada. Adapun data perkembangan data kunjungan desa wisata Blue Lagoon dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1.

Data kunjungan desa wisata Blue Lagoon Tahun 2015 s/d 2019

No	Tahun	Wisatawan Lokal	Wisatawan Asing	Total
1.	2015	40.020	430	40.476
2.	2016	55.300	620	55.920
3.	2017	61.138	930	62.068
4.	2018	69.521	1.070	70.591
5.	2019	78.644	694	79.538

Sumber: Pengelola Wisata Blue Lagoon 2021

Berdasarkan data di atas perkembangan kunjungan baik wisatawan lokal, maupun asing atau mancanegara lima tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tetapi setelah 2019 adanya masa pandemi Covid pengelola tidak mencatatnya karena terjadi penurunan drastis bahkan wisata sementara waktu ditutup karena diberlakukannya PPKM.

Terdapat tiga faktor yang harus dimiliki desa wisata untuk dapat dikembangkan secara optimal. Pertama, wilayah desa yang akan dikembangkan harus memiliki potensi alam dan budaya. Faktor kedua, desa tersebut harus

mempunyai keaslian lingkungan fisik. Faktor ketiga, masih terlambatnya perkembangan ekonomi pada wilayah desa tersebut. Faktor-faktor tersebut sebagai penentu dijadikannya suatu wilayah menjadi desa wisata. Desa wisata dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dengan memanfaatkan potensi ekonomi, sosial, budaya masyarakat lokal. (Damanik, 2013:69). Dalam pengembangan desa dibutuhkan sebuah pengelolaan yang baik agar pengembangan desa tersebut dapat berjalan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencapaian atau evaluasi, sehingga akan diketahui hambatan-hambatannya, supaya dapat dicari solusi penyelesaiannya. Sasaran pengembangan desa wisata adalah masyarakat lokal dengan mengembangkan kearifan lokal, untuk mensejahterakan masyarakat lokal.

Indikator desa wisata yang paling utama adalah dari sisi keterlibatan masyarakat desa baik dalam manajerial dan partisipasi masyarakat. Konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menekankan pada pembangunan pariwisata dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Hal ini selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang menghendaki masyarakat lebih berdaya dan memberikan manfaat. Masyarakat dalam hal ini diwajibkan berperan aktif maupun komprehensif di setiap tahapan pengembangan pariwisata, mulai tahap perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pengembangan, hingga tahap monitoring dan evaluasi (Hadiwijoyo, 2012) Bank Dunia dalam (Nuryanti, 2015). Pariwisata berbasis masyarakat juga bertujuan menciptakan keseimbangan dan keselarasan masing-masing kepentingan stakeholders dalam pengembangan pariwisata, seperti pemerintah, swasta dan masyarakat (Demartoto dkk, 2009). Dari data dinas pariwisata Kabupaten Sleman pada tahun 2017 terdapat 39 desa wisata di Kabupaten Sleman. Perkembangan desa wisata sendiri mengalami pasang dan surut. Beberapa desa wisata mengalami pergeseran status tetapi banyak juga desa wisata yang baru berdiri. Desa wisata Blue Lagoon termasuk salah satu pendatang baru desa wisata yang diresmikan menjadi desa wisata sejak tahun 2015.

Peneliti Sri Pajriah (2018) menyatakan bahwa peran SDM sebagai motor penggerak industri pariwisata, pencipta produk industri pariwisata, dan sebagai penentu daya saing industri pariwisata. Hal ini dapat diwujudkan melalui pendidikan pariwisata dan pelatihan pemandu wisata yang harus dimiliki oleh

pengelola wisata. Hal ini didukung peneliti Nandi (2008), yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai pelaku kebijakan dalam bidang kepariwisataan perlu peningkatan jenjang pendidikan yang bersifat formal maupun non formal. Pendidikan kepariwisataan dapat juga melalui sistem dan mekanisme pendidikan dan latihan (diklat) yang didesain secara baik. Hal ini diperkuat peneliti Onius Wakerkwa (2016), menyatakan bahwa masyarakat yang mempunyai pendidikan nonformal, memiliki tingkat partisipasi lebih baik dari pada yang hanya mempunyai pendidikan formal saja. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka makin tinggi pula tingkat partisipasi dalam mengelola pariwisata desa.

Berdasarkan fenomena dan peneliti terdahulu di atas, maka penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana implementasi pengelolaan Desa Wisata Blue Lagoon di Desa Widodomartani. Peneliti ingin menampilkan tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Widodomartani dalam mengelola Wisata Blue Lagoon yang dilihat dari 4 aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan, pencapaian dan hambatan yang dialaminya, sehingga penulis tertarik mengambil judul **:”Implementasi Pengembangan Desa Wisata Blue Lagoon Desa Widodomartani, Kabupaten Sleman Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan pengembangan Desa Wisata Blue Lagoon di Desa Widodomartani, Kabupaten Sleman Yogyakarta?
2. Apakah format pelaksanaan pengembangan Desa Wisata Blue Lagoon di Desa Widodomartani, Kabupaten Sleman Yogyakarta?
3. Apakah pencapaian atau evaluasi pengembangan Desa Wisata Blue Lagoon di Desa Widodomartani, Kabupaten Sleman Yogyakarta?
4. Apakah kendala-kendala pengembangan Desa Wisata Blue Lagoon di Desa Widodomartani, Kabupaten Sleman Yogyakarta?

C. Kerangka Konseptual/Kerangka Berpikir

1. Konsep Desa Wisata

Pengelolaan Desa Wisata dalam penelitian ini mengadopsi dari konsep yang dikembangkan Pitana dan Diarta (2009) yang menyatakan bahwa konsep desa wisata dimulai dari pengelolaan sumberdaya Desa Wisata. Untuk mencapai tujuan pengelolaan Desa Wisata yang berkelanjutan dan efektif, maka diperlukan perencanaan desa wisata yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Untuk menjamin perlindungan terhadap ekosistem dan degradasi kualitas lingkungan, maka diperlukan manajemen sumberdaya. Untuk mampu mengelola sumber daya Desa Wisata, maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang profesional, yang berhubungan tingkat pendidikan pengelola itu sendiri.

Sumber daya manusia yang profesional dapat berdampak pada pengelolaan pariwisata yang efektif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan profesional Sumber Daya Manusia bidang pariwisata, maka perlu pengembangan SDM yang profesional, dengan terwujudnya pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan manusia seutuhnya yaitu pembangunan yang diarahkan pada pembangunan jasmani dan rohan cerdas, terampil dan mandiri harus ada komitmen dari semua pihak dalam pencapaian. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia merupakan bentuk usaha untuk membentuk pegawai atau karyawan agar menguasai berbagai kemampuan yang dibutuhkan organisasi. Pada hal ini pengelola desa wisata untuk mampu mengelola desa wisata yang optimal, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang kepariwisataan (Barthos, 1999:97).

Konsep pengembangan desa wisata pada intinya adalah mengembangkan wilayah desa dengan tidak merubah yang sudah ada, tetapi lebih cenderung mengembangkan potensi desa yang sudah ada dengan melakukan pemanfaatan potensi wilayah desa berupa unsur-unsur yang ada di dalam desa wisata untuk tujuan sebagai atribut produk wisata dalam skala kecil menjadi perangkat kegiatan pariwisata dan mampu menyediakan serta memenuhi kebutuhan perjalanan wisata baik dari daya tarik maupun fasilitas pendukung (Muljadi, 2012:12).

Menurut Priasukmana & Mulyadin (2013:38) yang dikatakan desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang masih memiliki suasana alam yang asli, baik keaslian budaya, lingkungan sosial, adat-istiadat maupun alam yang belum dirubah manusia. Desa wisata memiliki ciri khas yang unik yang tidak dapat dimiliki wilayah lain. Potensi dan ciri khas yang dimiliki suatu wilayah pedesaan belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga perlu dikembangkan menjadi desa wisata.

Ismayanti (2013:51) menyatakan bahwa desa wisata adalah kemampuan berupa unsur yang dimiliki suatu wilayah atau kawasan pedesaan seperti atribut produk wisata secara terpadu, sehingga wilayah desa tersebut mampu menawarkan keseluruhan suasana dari pedesaan yang memiliki keasrian pedesaan, baik dari tatanan kehidupan maupun budaya sosial budaya dan ekonomi serta adat istiadat yang mempunyai ciri khas arsitektur dan tata ruang desa menjadi suatu rangkaian kegiatan dan aktivitas pariwisata.

Atas dasar uraian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa desa wisata merupakan suatu wilayah yang menjadi objek wisata, dimana wilayah tersebut memiliki ciri khas keasrian daerah pedesaan yang masih asri dan asli baik budaya, sosial ekonomi dan adat istiadatnya.

Pengelolaan desa wisata membutuhkan peran dari manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia pariwisata yang berkompeten pada bidangnya akan mampu mempercepat pengembangan desa wisata, sebagai potensi wisata desa, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Manajemen sumber daya manusia yang akan diisi oleh masyarakat lokal, maka hal ini perlu peningkatan kemampuan dan ketrampilan dalam bidang wisata. Hal ini berhubungan dengan tingkat pendidikan masyarakat sekitar Wisata Desa yang masih rendah. Manajemen krisis dalam pariwisata merupakan komponen yang sangat esensial, tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi krisis tetapi juga untuk membatasi dampaknya terhadap organisasi, daerah tujuan wisata, maupun industri yang berhubungan dengan Wisata Desa (Pitana dan Diarta, 2009:97).

Terkait dengan konsep desa wisata dalam penelitian ini akan melakukan kajian pustaka terutama terkait dengan konteks strategi dan proses pengembangan desa wisata. Untuk mengembangkan potensi pedesaan menjadi desa wisata maka perlukan konsep teori tentang kriteria desa wisata. Kriteria desa wisata terkait dengan produk dan daya tarik wisata, kesiapan dan penerimaan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia, dan ketersediaan ruang untuk pengembangan fasilitas pendukung wisata merupakan data primer yang diperoleh dan dijadikan dasar dalam pengolahan data hasil penelitian.

Wilayah atau kawasan pedesaan yang dijadikan desa wisata memiliki karakteristik tersendiri. Termasuk potensi yang dimiliki harus dinilai secara seksama apakah wilayah pedesaan itu layak atau tidak untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Ada beberapa komponen yang harus dimiliki suatu wilayah atau kawasan untuk dijadikan desa wisata yaitu (Anthonius Ibori, 2013):

- 1) Wilayah tersebut memiliki atraksi atau daya tarik yang khas dan unik.
- 2) Wilayah tersebut memiliki sarana dan prasarana yang menunjang wisata seperti akomodasi pariwisata, penginapan, rumah makan, pusat jajanan atau cenderamata, dan pusat pengunjung.
- 3) Wilayah tersebut memiliki aktivitas wisata
- 4) Wilayah tersebut memiliki pelayanan wisata yang baik. Pengembangan desa wisata dapat dipengaruhi adanya faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan SDM pariwisata dilakukan dengan cara atau metode pendidikan, pelatihan, mengikutkan seminar, diskusi dan lain-lain pada bidang kepariwisataan.

- 2) Kemitraan/Kerjasama

Kemitraan atau kerjasama dapat dilakukan antara pihak pengelola desa wisata dengan pengusaha pariwisata yaitu pihak Dinas Pariwisata daerah terkait dengan beberapa bidang yaitu akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan dan lain sebagainya.

3) Kegiatan pemerintahan di desa

Kegiatan pemerintah desa merupakan partisipasi pemerintah desa terhadap pengembangan desa wisata seperti rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara adat yang dilaksanakan di desa wisata.

4) Promosi

Pengembangan desa wisata sangat memerlukan promosi untuk dapat menarik pengunjung secara optimal. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti mengundang wartawan dari media cetak maupun elektronik.

5) Festival/pertandingan

Festival merupakan event-event yang dilaksanakan pengelola desa wisata, baik dalam bentuk kesenian maupun olahraga.

2. Konsep Pengembangan Desa Wisata

Prinsip pengembangan desa wisata adalah sebagai salah satu produk wisata alternatif yang dapat memberikan dorongan bagi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan serta memiliki prinsip-prinsip pengelolaan antara lain, ialah: (1) memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat, (2) menguntungkan masyarakat setempat, (3) berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat, (4) melibatkan masyarakat setempat, (5) menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan, dan beberapa kriteria yang mendasarinya seperti antara lain:

- a. Penyediaan fasilitas dan prasarana yang dimiliki masyarakat lokal yang biasanya mendorong peran serta masyarakat dan menjamin adanya akses ke sumber fisik merupakan batu loncatan untuk berkembangnya desa wisata.
- b. Mendorong peningkatan pendapatan dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi tradisional lainnya.
- c. Penduduk setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk pariwisata yang memanfaatkan

kawasan lingkungan dan penduduk setempat memperoleh pembagian pendapatan yang pantas dari kegiatan pariwisata.

d. Mendorong perkembangan kewirausahaan masyarakat setempat.

Metode yang digunakan untuk pengembangan pariwisata atau desa wisata yang paling tepat ada pendekatan partisipasi. Pendekatan partisipasi adalah pengembangan suatu wilayah untuk dijadikan desa wisata yang tujuan utamanya dengan melibatkan masyarakat sekitar secara optimal. Sumber daya abai alam dan manusia di lingkungan objek wisata desa harus dikembangkan dan diperbdayakan secara optimal untuk mendukung suksesnya pengembang desa wisata. Pentingnya kaspsitas msyarakat untuk dikembangkan menajdi dasar kebijakan dalam mengembagkan desa wisata, Faktor internal dari strategi pengembangan desa wisata menjadi hal penting dalam keterlibatan masyarakat sekitar.

3. Konsep Perencanaan

Sedangkan dalam prinsip perencanaan yang perlu dimasukkan dalam “*prelemenay, planning*” yaitu (1) meskipun berada di wilayah pariwisata tak semua tempat dan zona lingkungan harus menjadi daya tarik wisata dan (2) potensi desa wisata tergantung juga kepada kemauan masyarakat setempat untuk bertindak kreatif, inovatif, dan kooperatif. Tidak semua kegiatan pariwisata yang dilaksanakan di desa adalah benar-benar bersifat desa wisata, oleh karena itu agar dapat menjadi pusat perhatian pengunjung, desa tersebut pada hakikatnya harus memiliki hal yang penting, antara lain:

- a. Keunikan, keaslian, sifat khas
- b. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa
- c. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung
- d. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.

Perencanaan pariwisata di desa bukanlah tugas yang mudah terutama dalam keadaan yang mempunyai lingkungan alam dan budaya yang peka. Perencanaan yang disusun untuk mengembangkan wilayah desa wisata harus dilakukan secara berkesinambungan. Perencanaan wilayah desa

wisata harus dianggap sebagai suatu proses pengembangan desa wisata secara bertahap dengan memperhatikan tindakan pemeliharaan yang menguntungkan berbagai pihak.. Mengingat perencanaan kawasan desa wisata lebih banyak melibatkan peran, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, maka bentuk perencanaannya lebih menitik beratkan kepada *Community Based Tourism*.

Dalam merencanakan suatu kegiatan atau program, dalam hal ini adalah pengelolaan desa wisata, maka perencanaan sangat penting. Perencanaan adalah proses persiapan yang dilakukan secara sistematis dan mengedepankan rasional pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan dapat digunakan sebagai pencapaian tujuan dalam menggunakan sumber-sumber yang ada secara efektif dan efisien. Perencanaan harus memiliki dasar konsep yang berkesinambungan, berorientasi sistem, komprehensif, terintegrasi dan ramah lingkungan serta fokus pada keberhasilan pengembangan yang dapat mendukung keterlibatan masyarakat. Inskeep (1991) dalam Ridwan (2012:4).

Menurut Paturusi (2008:27), dalam merencanakan sebuah pariwisata harus dapat memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan masa depan suatu destinasi wisata dengan mempertimbangan alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan serta implementasinya terhadap alternatif terpilih dan evaluasinya. Proses perencanaan mempertimbangkan lingkungan (politik, fisik, sosial dan ekonomi) sebagai suatu komponen yang saling terkait dan saling tergantung satu dengan yang lainnya. Perencanaan wisata dilakukan dengan tetap mempertimbangan kondisi alam dan lingkungan serta kearifan lokal masyarakat sekitar obyek wisata.

Ridwan (2012:38), ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam merencanakan pengembangan pariwisata yaitu, sebagai berikut :

1. Pengembangan pariwisata harus direncanakan sesuai dengan pembangunan regional atau nasional sebagai pembangunan ekonomi, budaya dan sosial yang terintegrasi.
2. Pengembangan pariwisata harus direncanakan secara terpadu dengan sektor-sektor lainnya yang berkaitan dengan bidang pariwisata

3. Pengembangan pariwisata harus direncanakan dengan kebutuhan pariwisata daerah di bawah koordinasi perencanaan fisik daerah secara komprehensif.
4. Perencanaan fisik pengembangan pariwisata harus didasarkan suatu studi atau penelitian dan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan alam dan budaya di sekitar wilayah pengembangan.
5. Pengembangan fisik pariwisata harus direncanakan sesuai dengan lingkungan alam sekitar dan harus memperhatikan faktor geografis secara luas.
6. Pengembangan pariwisata harus direncanakan dengan melihat baik secara ekonomi, budaya dan sosial masyarakat yang ditimbulkannya.
7. Pengembangan pariwisata harus direncanakan dengan mengembangkan tujuannya yaitu memberikan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ridwan (2012:39) menyatakan perencanaan pengembangan pariwisata pada prinsip ada 5 pendekatan yang perlu diketahui dan diimplementasikan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata, yaitu: (1) Pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal, (2) Pendekatan berkelanjutan, (3) Pendekatan kesisteman, (4) Pendekatan kewilayahan, (5) Pendekatan dari sisi penawaran (*supply*) dan Permintaan (*demand*). Kelima pendekatan perencanaan tersebut akan dijelaskan, sebagai berikut :

1) Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Lokal.

Prinsip yang dibangun dalam pariwisata di Indonesia adalah pariwisata yang diperoleh dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan demikian perencanaan pengembangan pariwisata mengutamakan keterlibatan masyarakat lokal. Masyarakat lokal atau masyarakat sekitar objek wisata merupakan pemilik dan juga akan lebih tahu tentang objek dan daya tarik wisata yang ada di sekitarnya. Keterlibatan masyarakat setempat akan mempermudah keamanan, kebersihan, ketertiban dan kelestarian objek dan daya tarik wisata tersebut.

2) Pendekatan Berkelanjutan.

Dalam perencanaan pariwisata harus berdasarkan pendekatan pengembangan wisata berkelanjutan. Pengembangan wisata berkelanjutan adalah pengembangan wisata yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan sumber daya alam (ekologi), budaya daerah atau kearifan lokal. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada Pasal 2 disebutkan diantaranya bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan, asas kelestarian, dan asas partisipatif. Ada 3 (tiga) aspek yang penting dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu: aspek ekonomi mengenai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengubah pola produksi serta konsumsi kearah yang seimbang. Aspek sosial-budaya mengenai penyelesaian masalah kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, kesehatan masyarakat, peningkatan pendidikan dan lain-lain. Aspek lingkungan mengenai upaya konservasi dan preservasi sumber daya alam, serta pengurangan dan pencegahan polusi maupun limbah.

3) Pendekatan Kesisteman

Pendekatan sistem pada pengembangan pariwisata merupakan kegiatan pariwisata secara multisektoral, dimana kegiatan pariwisata memiliki berbagai sektor dan unsur yang saling terkait satu sama lainnya yang saling mendukung untuk mengembangkan pariwisata di suatu tempat.

4) Pendekatan Kewilayahan.

Wilayah yang dibangun suatu wisata, akan memiliki kegiatan pariwisata dalam ruang wilayah atau dengan kata lain kegiatan pariwisata membutuhkan ruang lingkup yang berada dalam wilayah. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan pariwisata harus melalui pendekatan kewilayahan.

5) Pendekatan Penawaran (*Supply*) dan Permintaan (*Demand*).

Perencanaan pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah untuk mencari titik temu antara penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan pengembangan pariwisata seharusnya terlebih dahulu mengidentifikasi produk wisata (penawaran) yang ada di daerah tujuan wisata dan pasar wisatawan (permintaan), baik yang aktual maupun potensial kemudian dilakukan suatu analisis untuk kedua aspek tersebut,

sehingga titik temu kedua aspek tersebut tercapai. Maka dengan demikian, produk wisata yang akan dijual sesuai dengan permintaan (kebutuhan dan keinginan wisatawan)

4. Konsep Pelaksanaan

Pelaksanaan atau penerapan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari kegiatan usaha, cara, teknik dan metode untuk menggerakkan para anggota organisasi agar mau dan ikhlas untuk bekerja dengan sebaik-baiknya untuk tercapainya organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis. Pelaksanaan atau penerapan (*actuating*), dilakukan setelah suatu organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan mempunyai struktur organisasi termasuk tersedianya anggota sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk. beberapa kegiatannya adalah melakukan pengarahan, bimbingan dan komunikasi.

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan atau *actuating*. Setelah dilakukan perencanaan yang baik dan juga pembentukan organisasi atau pengorganisasian kepariwisataan, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan atau *actuating*. Tahap ini merupakan tahap penerapan setelah dilakukan perencanaan dan pembentukan organisasi atau pengorganisasian.

a. Daya Tarik

Setelah dilakukan perencanaan dan pembentukan organisasi untuk menentukan daya tarik apa yang akan dimunculkan dalam daerah wisata, selanjutnya harus ada penerapan atau pelaksanaan dari perencanaan tersebut. Pelaksanaan daya tarik dapat meliputi penentuan langsung hal apa yang akan dijadikan daya tarik setelah sebelumnya direncanakan dengan baik.

b. Sistem Penunjang

Pelaksanaan dari system penunjang sendiri dapat meliputi penentuan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata yang akan digunakan. Dalam tahap ini penerapan dan pemilihan sarana pendukung yang baik dan tepat sasaran sangat penting untuk mendukung kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan.

c. Destinasi

Langkah berikutnya adalah penentuan daerah destinasi wisata atau daerah yang tepat untuk dijadikan sebagai bahan untuk menarik wisatawan. Pada tahap ini akan ditentukan langsung daerah yang akan dijadikan destinasi wisata setelah melalui tahap perencanaan dan pengorganisasian. Pelaksanaan atau penetapan daerah destinasi nantinya akan berpengaruh pada jumlah pengunjung yang akan mengunjungi daerah wisata. Hal ini dikarenakan destinasi wisata merupakan suatu factor penting dalam manajemen kepariwisataan.

d. Infrastruktur

Infrastruktur dapat juga berupa bentuk penginapan atau sarana transportasi yang akan digunakan oleh wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata. Oleh karena itu pemilihan penginapan atau transportasi yang tepat sangatlah penting dalam tahap pelaksanaan atau *actuating*. Hal ini sangat berpengaruh nantinya pada kegiatan pariwisata yang dilakukan, karena infrastruktur pariwisata merupakan salahsatu bahan pertimbangan bagi wisatawan untuk melakukan suatu kegiatan wisata.

5. Konsep Evaluasi

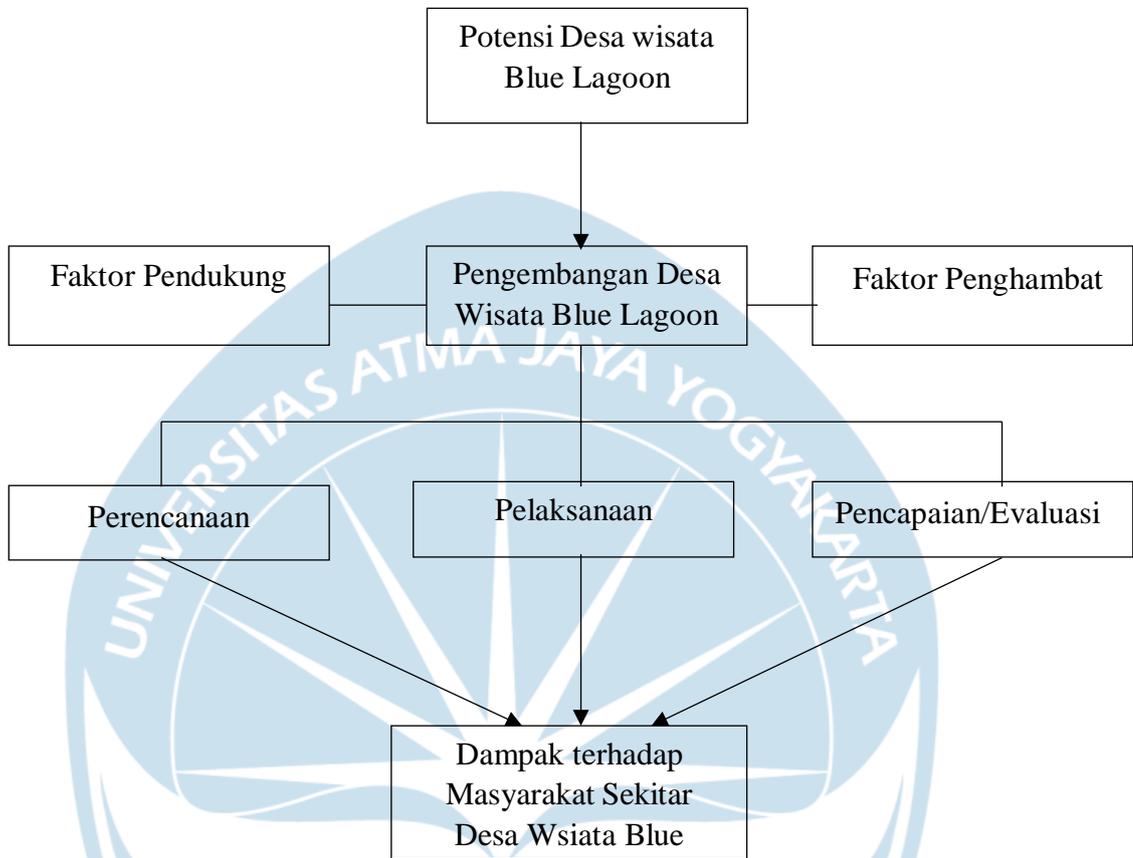
Evaluasi Secara harfiah asal kata evaluasi yaitu to evaluate dengan awalan (prefix) e dan akhiran (suffix) –tion. Evaluasi memiliki arti menilai atau memberi nilai. Evaluasi merupakan bagian integral dari proses manajemen promosi kesehatan. Evaluasi merupakan kegiatan penilaian dengan membandingkan antara hasil pencapaian program dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Azwar, 2010). Tujuan evaluasi adalah untuk meningkatkan program kesehatan dan prasarana kesehatan untuk melaksanakannya dan untuk memandu alokasi sumber daya dalam program saat ini dan yang akan datang. Evaluasi adalah cara sistematis untuk belajar dari pengalaman dan menggunakan pelajaran yang didapat untuk meningkatkan kegiatan saat ini dan mempromosikan perencanaan yang lebih baik dengan pemilihan alternatif yang cermat untuk tindakan di masa depan. Dengan demikian, ini harus menjadi proses berkelanjutan yang bertujuan untuk menjadikan kegiatan kesehatan lebih relevan, lebih efisien, dan lebih efektif. Penerapannya membutuhkan pikiran terbuka yang mampu

melakukan kritik konstruktif untuk menghasilkan penilaian yang baik. (World Health Organization, 1989).

Dalam perkembangannya, tiap-tiap desa wisata memiliki irama dan pencapaian yang berbeda-beda. Ada yang cepat berkembang, ada yang biasa saja, ada juga yang kurang atau tidak berkembang. Sehubungan dengan perbedaan itu, perlu diadakan evaluasi perkembangan desa wisata di Badung sehingga bisa disusun strategi untuk pengembangan yang lebih maksimal sesuai tujuan yang diharapkan. Perlunya evaluasi pengembangan desa wisata sudah banyak menjadi wacana publik di media massa. Wacana masyarakat itu menunjukkan keinginan mereka agar program pemerintah dalam pengembangan desa wisata benar-benar sukses sesuai dengan tujuannya.

Desa Widodomartani Kabupaten Sleman yang memiliki potensi wisata, sehingga perlu dikembangkan pengolahannya dengan terus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengembangan suatu wisata desa. Wisata desa yang mampu dikembangkan secara geografis maupun kewilayahan, sehingga desa wisata perlu di indentifkan masalah yang ada, sehingga dapat direncanakan secara optimal.

Ditarik dari permasalahan di atas, peneliti akan membahas mengenai pengelolaan yang ada di Desa Wisata Widodomartani Blue Lagoon. Pengelolaan desa wisata tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian. Perencanaan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menyusun suatu rancangan kegiatan yang akan diadakan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan, pelaksanaan berarti kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama antarapengelola dan juga masyarakat sekitar dalam melakukan kegiatan yang sudah dirancang pada tahap perencanaan. Selanjutnya yaitu pencapaian kegiatan, evaluasi hasil yang sudah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan rencana yang dibuat atau belum. Berdasarkan pemikiran tersebut peneliti menggambarkan kerangka dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam tulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui perencanaan pengembangan Desa Wisata Blue Lagoon di Desa Widodomartani, Kabupaten Sleman Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui format pelaksanaan pengembangan Desa Wisata Blue Lagoon di Desa Widodomartani, Kabupaten Sleman Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pencapaian/evaluasi pengembangan Desa Wisata Blue Lagoon di Desa Widodomartani, Kabupaten Sleman Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui kendala-kendala pengembangan Desa Wisata Blue Lagoon di Desa Widodomartani, Kabupaten Sleman Yogyakarta.

E. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual/kerangka berpikir.

Bab II. Metodologi Penelitian dan Deskripsi obyek/Subjek Penelitian

Bab ini membahas tentang jenis penelitian dan metode penelitian, sampel/informan, Operasionalisasi konsep, metode pengumpulan data, jenis data, cara analisis data, Deskripsi objek atau subjek penelitian.

Bab III. Temuan dan Pembahasan

Bab ini membahas uraian mengenai hasil temuan dari porses pengumpulan data dan membahas hasil dari proses pengolahan data penelitian.

Bab IV. Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan ringkasan-ringkasan berbagai temuan penelitian.